

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman dan acuan berfikir penulis dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini. “peranan dinas pariwisata kepemudaan dan olahraga dalam pengembangan pembangunan pulau jemur”. Berikut ini dikemukakan teori dan konsep yang mendukung berkaitan dengan variabel yang diteliti untuk membantu memecahkan permasalahan yang terjadi antara lain sebagai berikut:

1. Konsep Pemerintahan

Secara Etimologi kata Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

- a. Mendapat awalan “Pe” menjadi kata “Pemerintah” berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu Negara.
- b. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “Pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki Legitimasi.
Syafi`I (2001:43)

Menurut Ndraha (1997:6) mengatakan pemerintah adalah gejala social, artinya terjadi dalam hubungan antara anggot masyarakat, baik individu, kelompok dengan kelompok, mau pun antara individu dengan kelompok.

Menurut Ndaraha (2003:7) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melinungi kebutuhan dan

tuntuan tiap orang akan jasa-publik dan layanan-civil, dalam hubungan pemerintah, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh orang yang bersangkutan.

Menurut Nurcholis, (2005 :112) pemerintah adalah sekelompok orang yang diberikan kekuasaan legal oleh masyarakat setempat untuk melaksanakan pengaturan atas interaksi yang terjadi dalam pergaulan masyarakat(baik antar individu dengan individu, individu dengan lembaga pemerintah, lembaga pemerintah dengan pihak swasta, mau pun pihak swasta dengan individu) untuk memenuhi kebutuhan dn keperluan hidup sehari-hari, sehingga interaksi tersebut dapat berjalan secara Harmonis.

Didalam kata dasar “Perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung didalamnya sebagai berikut:

1. Ada dua pihak yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat.
2. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan pihak Legitimasi untuk mengatur dan mengurus Rakyat.
3. Hal yang diperintah mempunyai keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah.
4. Antara pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik secara Vertikal maupun secara Horizontal. Syafie (2001:43-44)

Istilah pemerintah setidaknya menunjukkan pada empat pengertian pokok yaitu:

- a. Pemerintah menunjuk pada suatu Pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah.
- b. Pemerintah menunjukan pada keberadaan dimana proses Pemerintah tersebut berlangsung, seringkali penamaan suatu Entitas Pemerintah menunjukan secara langsung dimana pemerintahan tersebut berada.
- c. Pemerintah menunjukan secara langsung person (orang) yang menduduki jabatan pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan.
- d. Pemerintah juga dapat mengacu pada aspek bentuk, metode atau sistem Pemerintahan dalam suatu masyarakat, yakni struktur dan pengelolaan badan Pemerintah serta hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Finer dalam Labolo (2010:14-16)

Pemerintahan adalah organ yang berwenang yang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan Pemerintahan, setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntunan dan harapan yang diperintah. Awang dan Wijaya (2012:6).

Dalam berbagai pustaka tentang ilmu pemerintahan telah dicatat beberapa definisi ilmu Pemerintahan, beberapa definisi itu bertitik tolak dari anggapan dasar bahwa ilmu pemerintahan itu bagian Integral dari ilmu politik, namun beberapa definisi lainnya bersifat normatif dari beberapa anggapan untuk sementara ilmu pemerintahan dapat didefinisikan ilmu yang mempelajari proses pemenuhan kebutuhan konsumen produk pemerintahan akan pelayanan publik

dan pelayanan sipil dalam hubungan pemerintahan, intinya pelayanan publik, pelayanan sipil, hubungan pemerintahan, pemenuhan kebutuhan. Ndraha (2003:7).

Menurut Iver Syafie, (2011:14) Pemerintahan adalah suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan serta sebagaimana manusia itu bisa diperintah, sedangkan Pemerintah adalah kelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan.

Dari ketentuan UUD 1945 didalam buku Lukman Hakim (2011 : 72), pendapat para ahli mengenai konsep Pemerintahan dan Perintah serta ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat didefenisikan beberapa pengertian berikut:

1. Pemerintahan dalam arti luas adalah kegiatan Negara dalam menjalankan kekuasaan mencakup tiga badan yaitu Legislatif, Eksekutif, dan Yudisial. Menurut UUD 1945 mencakup lembaga Negara MPR, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY, lembaga Pemerintah Independen.
2. Pemerintah dalam arti sempit hanya fungsi Pemerintah saja, tidak termasuk badan yang menjalankan fungsi perundang-undangan dan fungsi peradilan, menurut UUD 1945 adalah Presiden dibantu Menteri Negara, lembaga non Departermen, lembaga setingkat Menteri.
3. Pemerintahan Daerah adalah terdiri dari Kepala Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota dan DPRD Provinsi serta DPRD Kabupaten/Kota). Sedangkan Pemerintah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah (Gubernur, Dinas Daerah dan Kepala kator, UPT Provinsi,

Bupati/Walikota beserta Dinas UPT, Lembaga dan Kantor Camat dan Lurah.

Pengertian lain dari pemerintahan adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa di perintah. R. Mac Iver dalam Syafi'i (2009:22).

Selanjutnya maksud pemerintahan adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik, gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui Adat Istiadat, Institusi, dan hukum dalam sebuah Negara. Azam Awang, Mendra Wijaya (2012:6).

Kemudian didalam bidang Ilmiah dibedakan antara pengertian pemerintah sebagai organ (alat) Negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pengertian pemerintahan sebagai fungsi dari pada pemerintah. Kansil (2008:17). Kemudian pendapat lain mengatakan pemerintah harus diartikan luas yang mencakup semua badan-badan Negara. Ni matul Huda (2010:32).

Dalam defenisi lain Ilmu pemerintah diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dalam hubungan pusat dan daerah antara lembaga serta antara yang memerintah dengan yang diperintah. Intinya : Melaksanakan Koordinasi, Kepemimpinan, Legislatif, Eksekutif, Yudikatif hubungan pusat yang di perintah. Syafei (2009:23).

Selanjutnya terdapat beberapa fungsi pemerintahan yaitu fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan.

- a. Fungsi pengaturan yang lazimnya dikenal sebagai Regulasi dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tetap sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat.
- b. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.
- c. Fungsi pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat.
- d. Fungsi pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Rasyid dalam Muhadam Labolo (2006:26).

Menurut Ndaraha (2005:36) Pemerintahan adalah proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan Manusia dan Masyarakat. Semua badab atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan Manusia dan Masyarakat

2. Otonomi Daerah dan Dearah Otonomi

Otonomi Daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.Sedangkan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat Hukum yang mempunyai batas Daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara kesatuan Republik Indonesia. Widjaja (2002:76).

Otonomi yang diselenggarakan dalam Negara kesatuan Republik Indonesia, paling tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mendasarinya, sebagai berikut:

- a. Keragaman bangsa Indonesia dengan sifat istimewa pada berbagai golongan, tidak memungkinkan pemerintahan diselenggarakan secara seragam.
- b. Wilayah Indonesia yang berpulau-pulau dan luas dengan segala pembawaan masing-masing, memerlukan cara penyelenggaraan yang sesuai dengan keadaan dan sifat-sifat dari sebagian pulau tersebut.
- c. Desa dan berbagai persekutuan hukum merupakan salah satu sandi yang ingin di pertahankan dalam susunan pemerintahan Negara.
- d. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki suatu susunan pemerintahan yang Demokratis.
- e. Desentralisasi adalah salah satu cara mewujudkan tatanan Demokrasi tersebut.
- f. Efisiensi dan Efektifitas merupakan salah satu ukuran keberhasilan organisasi Republik Indonesia yang luas dan penduduk yang banyak dan beragam memerlukan suatu cara penyelenggaraan pemerintahan Negara yang menjamin efisiensi dan efektifitas. Dengan membagi penyelenggaraan pemerintahan dalam satuan-satuan yang lebih kecil (Desentralisasi), efisiensi dan efektifitas tersebut dapat tercapai. Rosidi (2010:83).

Pemerintah Daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari Dekonsentrasi kesistem Desentralisasi. Otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah Daerah yang bersifat Operasional dalam rangka sistem Birokrasi pemerintahan, tujuan Otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan kepada masyarakat. Widjaja (2002:76).

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan kekuasaan kepada Daerah antara lain adalah:

1. Menumbuh kembangkan Daerah dalam berbagai bidang.
2. Meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat.
3. Menumbuhkan kemandirian Daerah.

4. Meningkatkan daya saing Daerah dalam proses pertumbuhan.

3. Konsep Peranan

Menurut Kaho, (2002:220) Peranan dalam penyelenggaraan Pemerintah adalah melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah disusun secara tegas akan memudahkan Birokrasi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, oleh karena itu untuk menghindari terjadi fungsi Birokrasi sebagai akibat struktur yang tidak Rasional, tidak diperlengkapi oleh Pegawai yang betul-betul professional. Hubungan koordinasi diperlukan agar dalam organisasi terjadi kesatuan tindakan, kesatuan arah, penyesuaian dan kesenambungan antar bagian agar tujuan organisasi dapat tercapai.

Menurut Ndaraha (2003:53) peranan diartikan suatu sebagian perilaku yang diharapkan dari atau telah ditetapkan bagi Pemerintah selaku Administrator disetiap jenjang Pemerintahan.

Menurut Soekanto (2001:269) kata peranan mencakup sedikitnya tiga pengertian:

- a. Peranan meliputi Norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam Masyarakat.
- b. Peranan merupakan suatu Konsep prihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam Masyarakat sebagai Organisasi.
- c. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku Individu yang penting bagi Struktur Sosial Masyarakat.

Menurut Soekanto (2005:243) pengertian Peranan adalah merupakan Aspek Dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.

Peranan juga bertujuan untuk mempermudah upaya pencapaian tujuan Masyarakat dengan cara menyediakan atau memberikan Fasilitas yang dipergunakan Masyarakat untuk mengatasi masalah.

Menurut Knott dan Miller (Kumorotomo, 2002:248) bahwa terdapat empat macam persoalan yang dihadapi dalam Birokrasi Pemerintahan yaitu:

1. Daur kekuatan aturan (regidli cycle) struktur yang kurang fleksibel, Birokrasi cenderung membatasi kapasitas Kognitif dari Aparat-aparatnya. Birokrasi sering ragu-ragu bertindak karena sistem Senioritas dan aturan yang kaku.
2. Pengalihan sasaran (goal Displacement) kelemahan manajerial seringkali tidak berhasil Memotifasi individu untuk mencapai tujuan sebaliknya sistem tersebut hanya merangsang untuk mengikuti aturan-aturan Hirarkis dan prosedur-prosedur standar (standard Operasional Procedure)
3. Kurangnya Kapasitas personil terlatih (skilled Incapacity) kemampuan personil dalam melihat tugas-tugasnya dalam kerangka proses organisasi secara keseluruhan.
4. Sistem kewenangan berganda (dua sistem Of Authority) ketidak sepahaman antara Pakar menentang Otoritas Hirarkis dari seseorang atasan yang awan yang terjadi seringkali bukan karena tidak sepaham tetapi lebih kepada Otoritas Profesional.

Menurut Siagian (2012:143-145) Peranan Pemerintah dalam pembangunan menyatakan bahwa peran Pemerintah selaku Stabilisator terbagi dari beberapa bagian yaitu:

a. Stabilisator Bidang Politik

Peran Pemerintah dalam bidang Politik adalah menjamin bahwa dalam kehidupan Politik Bangsa tidak terjadi rongrongan, baik yang datang dari luar peran Pemerintah disini member maksud bahwa pemerintah Desa, mempunyai peranan dalam pembangunan

b. Stabilisator Bidang Ekonomi

Peran sebagai Stabilisator yang dimaksud adalah menciptakan iklim atau kondisi yang memungkinkan perekonomian Nasional.

c. Stabilisator Bidang Sosial Budaya

Peranan Pemerintah dibidang Sosial Budaya terlihat bahwa menjadikan Bangsa menjadi Masyarakat yang maju dan Modren, tanpa kehilangan Jati Diri.

4. Konsep Birokrasi

Birokrasi merupakan struktur Organisasi disektor pemerintahan yang memiliki ruang lingkup tugas yang luas, Birokrasi adalah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan umum. Widjaja (2002:80).

Selanjutnya birokrasi adalah merupakan sebuah ruang mesin Negara. Setiyono (2004:9). Birokrasi sering didefenisikan sebagai organisasi yang cenderung untuk menangani tugas-tugas Administrasi dalam skala besar serta

mengkoordinasikan pekerja orang banyak secara sistematis. Blau dan Mayer (dalam Ishak 2010:27).

Fungsi-fungsi yang begitu luas mengharuskan pemerintah untuk menciptakan suatu jaringan struktur-struktur yang bisa menjamin pelaksanaan fungsi-fungsi itu secara efisien dan efektifitas. Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas rutin hanya bisa dijamin kalau ada badan-badan yang bekerja atas dasar pembagian kerja dan kemampuan teknis.

Fungsi-fungsi itu bisa dijalankan oleh serangkaian struktur-struktur yang disebut “Birokrasi” yang memiliki karakteristik “ideal” sebagai berikut:

- a. Pembagian kerja.
- b. Hirarki wewenang.
- c. Pengaturan perilaku.
- d. Impersonalitas hubungan.
- e. Kemampuan teknis.
- f. Karier. Weber (dalam ishak, 2010:27).

Birokrasi adalah suatu sistem dari suatu Organisasi yang kompleks, yang memerlukan penanganan khusus dalam berbagai keterampilan teknis yang dipergunakan untuk melaksanakan kebijakan yang ditemukan oleh pihak lain, terutama kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan penyelesaian usaha-usaha besar. Rosidi (2010:164).

5. konsep manajemen Pemerintahan

Menurut ndraha (2011:185) manajemen pemerintahan dalam hubungan ini terlihat melalui ruang lingkup materi pokok kurikulumnya:

- a. Asas dan sistem pemerintahan.

- b. Hukum tata pemerintahan.
- c. Ekologi pemerintahan.
- d. Filsafat dan etika pemerintahan.
- e. Praktik penyelenggaraan pemerintahan.
- f. Kepemimpinan pemerintahan.
- g. Reformasi pembangunan Daerah.

Manajemen diatas adalah dalam arti unit kerja, yang dibahas dalam arti disiplin. Manajemen mempelajari bagaimana menciptakan usaha secara *efficient* dan produktif, melalui fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Manajemen pemerintahan juga menyangkut *design* dan implementasi system perencanaan, penyusunan pegawai, pengembangan pegawai, pengolahan karir, evaluasi kinerja, kompensasi pegawai dan hubungan ketatanegaraan yang baik. Manajemen pemerintahan terdiri atas serangkainya keputusan dan praktek manajemen yang memengaruhi langsung sumber daya manusia dan orang orang yang bekerja pada organisasi pemerintahan. Manajemen pemerintahan merupakan aktivitas aktivitas yang dilakukan agar sumber daya manusia didalam organisasi pemerintahan dapat dilaksanakan secara efektif guna mencapai tujuan.

Menurut sroner, et al dalam Zulkifli (2005:28) mengatakan manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.

6. Konsep Kebijakan

Kata kebijakan berasal dari kata policy, yang mempunyai arti sebagai pilihan terbaik dalam batas-batas kompetensi aktor dan lembaga yang bersangkutan dan secara formal mengikat. Ndraha (2003:492-499). Kajian tentang kebijakan dalam arti luas usaha pengadaan informasi yang diperlukan untuk menunjang proses pengambilan kebijakan telah ada sejak manusia mengenal Organisasi dan tau arti keputusan. Kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana, dan program yang dilaksanakan secara jelas. Koryati (2005:7).

Kebijakan adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuk nyata (praktis) dari kebijakan. Ibrahim (2004:2).

Kebijakan merupakan keputusan mau pun langkah yang dilakukan untuk mencari penyelesaian dari permasalahan yang terjadi, didalam Masyarakat yang berada di wilayah hukum mau pun pemerintahan maka kebijakan tidak lepas pula dari kehidupan tersebut, karena selalu saja dapat terjadinya permasalahan Negara yang mempunyai tanggung jawab pada kehidupan Rakyat dan juga mempunyai tanggung jawab dari kebijakan yang dibuat tersebut. Kebijakan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Lembaga Negara tersebut dapat menjadi solusi akan permasalahan-permasalahan yang terjadi didalam kehidupan (Negara).

Pada umumnya para pakar kebijakan sependapat bahwa policy adalah suatu tindakan, panduan untuk katering aksi. (Richard M. Hodgetts dan Max S

Wortman, Jr., 1975,4 :491). Hodgetts dan Wortman kebijakan (business policy) itu bertingkat-tingkat dan tersusun secara vertikal, struktural, mulai dari kebijakan yang bersifat umum (misalnya kode etik dan profesi perilaku, lini bisnis), sampai pada kebijakan yang bersifat praktis dan konkret (misalnya larangan minum pada pekerja), enam tingkat berturut-turut kebijakan utama, kebijakan sekunder, kebijakan fungsional, kebijakan minor, prosedur dan rencana operasi standar, dan aturan.

Kebijakan dilingkungan pemerintahan, tersusun berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sistem nilai pemerintahan, mulai dari nilai ketuhanan sampai pada nilai keteladanan perilaku diri sendiri sehari-hari setiap actor dan aktris pemerintahan. Setiap kegiatan pemerintahan berhubungan dengan suatu kebijakan, pada setiap langkah dalam proses, fungsi, rute, dan siklus kebijakan, pihak yang diperintah terlibat atau dapat diperlibatkan.

7. Teori Pengembangan

Ada beberapa pendapat para ahli tentang arti dari pengembangan, menurut Suwantoro (1997 : 120) pengembangan bertujuan untuk mengembangkan produk dan pelayanan yang berkualitas, seimbang dan bertahap, sedangkan menurut Poerwadarminta (2000 : 474) lebih menekankan kepada suatu proses atau suatu cara menjadikan sesuatu menjadi maju, baik sempurna dan berguna.

Menurut joyosuharto (1995 : 123) pengembangan pariwisata memiliki tiga fungsi yaitu:

- a. Menggalakkan ekonomi.

- b. Memelihara kepribadian bangsa dan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup.
- c. Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa.

Disamping itu pengembangan pariwisata bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi wisatawan maupun komunitas tuan rumah, dengan adanya pembangunan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui keuntungan secara ekonomi yang dibawa ke kawasan tersebut. Dengan kata lain pengembangan pariwisata melalui penyediaan fasilitas infrastruktur, wisatawan dan penduduk setempat akan saling diuntungkan, pengembangan tersebut hendaknya sangat memperhatikan berbagai aspek seperti aspek budaya, sejarah dan ekonomi daerah tujuan wisata. Pada dasarnya pengembangan pariwisata dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan permasalahan (Mill, 2000 : 168).

8. Teori Koordinasi

Dalam sebuah Organisasi setiap pemimpin perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan yang dilakukan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, sesuai dengan wewenang yang diterima, tanpa adanya koordinasi setiap pekerjaan dari individu karyawan maka tujuan yang diusahakan tidak akan tercapai. Menurut Hasibuan (2006 : 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.

Menurut Goerge R. Terry dalam Hasibuan (2006 : 85) berpendapat bahwa koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Sedangkan menurut G.R. Terry dalam bukunya yang dikutip Hadayaningrat (2002 : 55) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan, menurut tinjauan Terry meliputi:

- a. Jumlah usaha baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif
- b. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut
- c. Directing atau penentuan arah usaha-usaha tersebut

Menurut Handoko (2003 : 195) koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan pada suatu yang terpisah (departemen atau bidang fungsional) pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif.

Berdasarkan pengertian diatas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pemimpin untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan bagian yang satu dengan bagian yang lain suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai.

9. Teori Pembangunan

Pembangunan dapat diartikan berbeda oleh setiap orang yang dilihat dari sudut pandang orang tersebut, perbedaan cara pandang dalam proses

pembangunan yang dilakukan tentang berapa maju proses pembangunan yang dilakukan disebuah Negara atau Daerah. Menurut Tarigan (2006 : 82) menyatakan bahwa pembangunan merupakan penambahan pendapatan masyarakat secara keseluruhan yang terjadi diwilayah tersebut, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (added value) yang terjadi.

Dalam pengertian yang mendasar, pembangunan haruslah mencakup masalah materi dan finansial dalam kehidupan manusia, oleh karena itu pembangunan seharusnya diselidiki sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari semua sistem ekonomi dan sosial. Todaro (2000 : 25).

Pembangunan adalah mengadakan, membuat, atau mengatur sesuatu yang belum ada, yang dilakukan untuk memakmurkan dan kesejahteraan masyarakat, pembangunan tersebut dapat berupa pembangunan fisik dan dapat merupakan pembangunan sosial ekonomi. Sedangkan pembangunan regional meliputi suatu wilayah dan mempunyai tekanan utama pada perekonomian dan tekanan berikutnya pada keadaan fisik, sehingga merupakan gabungan dari kedua hal tersebut. Pembangunan meliputi tiga kegiatan yang saling berhubungan meliputi:

- a. Menimbulkan peningkatan kemakmuran dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan sebagai tujuan, dengan tekanan perhatian pada lapisan terbesar (dengan pendapatan terkecil) dalam masyarakat.
- b. Memilih metode yang sesuai untuk mencapai tujuan.
- c. Menyusun kembali (restructuring) masyarakat dengan maksud supaya timbul pertumbuhan social ekonomi yang kuat.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pembangunan adalah suatu proses yang luas mencakup dimensi sosial, ekonomi, fisik, politik, budaya dan sebagiannya.

10. Teori Pariwisata

Pariwisata adalah suatu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan pekerjaan, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sector-sektor produktivitas lainnya. Pendit (2006 : 32)

Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ketempat lain, dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beranekaragam.

11. Teori Pengembangan Pariwisata

Pengembangan pariwisata adalah Strategi pengembangan keseluruhan komponen destinasi seperti: tema dari daya tarik utama, pengembangan fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sampai dengan pengembangan masyarakat setempat sebagai tuan rumah harus sesuai dengan konteks lingkungan makrinya. Sunaryo (2013 : 54)

Pengembangan adalah suatu proses penilaian sendiri dan perubahan perencanaan atas dasar sistem nilai tertentu. Indrawijaya (1989 : 23)

12. Teori Fasilitas Pariwisata

Fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang mendukung operasional objek wisata untuk mengakomodasikan segala kebutuhan wisatawan, tidak secara langsung mendorong pertumbuhan tetapi berkembang pada saat yang sama atau sesudah atraksi berkembang. Spiliane (1994 : 45).

Berdasarkan spiliane dalam Mukhlis (2008 : 10) fasilitas dikelompokkan menjadi tiga bagian yang meliputi:

a. Fasilitas Umum

Merupakan sarana yang dibutuhkan dan dirasa sangat perlu selama pengunjung berada disuatu objek wisata, fasilitas utama seperti:

1. Areal utama yang terbagi atas kebersihan.
2. Tampilan fisik dan luar areal.
3. Kendaraan yang terdiri dari keamanan.
4. Penyampaian kegunaan dan tampilan fisik.

b. Fasilitas pendukung

Merupakan sarana yang pada proposinya sebagai pelengkap fasilitas utama sehingga wisatawan akan merasa lebih betah, yang terdiri dari:

1. Taman.
2. Mushola.
3. Wc umum.
4. Pos keamanan.
5. Safety guard.
6. Kantin atau rumah makan dan hiburan.

c. Fasilitas penunjang

Pada dasarnya merupakan sarana yang bersifat sebagai pelengkap utama sehingga wisatawan terpenuhi apapun kebutuhan selama

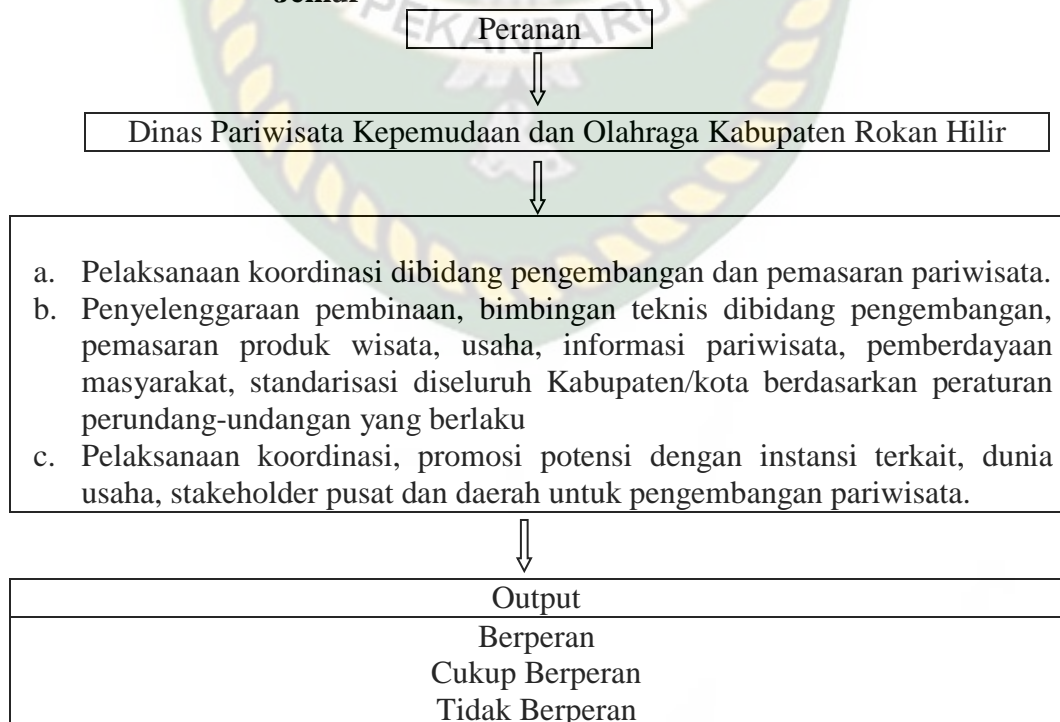
mengunjungi tempat wisata tersebut, sarana fasilitas penunjang itu meliputi:

1. Pos keamanan.
2. Ketanggapan petugas.
3. Tampilan fisik.
4. Pelayanan yang diberikan.

B. Kerangka Pikir

Kerangka pikir tentang Peranan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dalam menjalankan fungsi dari peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016, untuk menilai dari ukuran peranan yang dilakukan.

Gambar II.1 : Kerangka pemikiran peneliti tentang Peranan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dalam Pengembangan Objek Wisata Pulau Jemur



Sumber: Modifikasi Peneliti

C. Penelitian Terlebih dahulu

Ivrawati, 2017 skripsi Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pengembangan objek wisata air panas suaman di Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Penelitian diperoleh dengan hasil kategori cukup berperan untuk proses pengembangan objek wisata air panas suaman karena masih kurangnya kegiatan untuk memperkenalkan wisata air panas suaman dan kurangnya sarana pendukung di sekitar air panas suaman

D. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah dalam melakukan penelitian ini diperlukan persamaan persepsi atau pandangan dalam melihat indikator-indikator variabel dalam menganalisis Peranan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dalam Pengembangan objek wisata Pulau Jemur. Untuk itu diperlukan standar operasional sebagai indikator dan variabel yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Peranan adalah suatu daya upaya dari kemampuan perilaku untuk dapat menggerakkan dan membimbing serta menumbuhkan rasa kesadaran.
2. Peranan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir, tindakan Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga dalam pengembangan wisata ke Pulau Jemur.
3. Kebijakan adalah suatu keputusan yang merupakan bagian untuk mengatasi berbagai persoalan dan isu-isu yang ada dan berkembang, merupakan keputusan untuk melakukan pilihan tindakan tertentu.
4. Pengembangan Fasilitas adalah suatu proses penilaian secara perubahan untuk peningkatan ketersediaan keperluan untuk kunjungan yang akan dilakukan.
5. Pariwisata adalah perjalanan yang dilakukan dalam berbagai tujuan dari kunjungan perjalanan.

E. OPERASIONAL VARIABEL

Tabel II. 1 : Operasional Variabel Peranan Dinas Pariwisata Kepemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dalam Pengembangan Ojek Wisata Pulau Jemur.

Konsep	Variabel	Indikator	Item	Ukuran
1	2	3	4	5
Peranan adalah merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya, menurut Soekanto, 2002 : 268-269.	Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir	A. Pelaksanaan koordinasi di Bidang pengembangan dan pemasaran Pariwisata	A. Pengambnagan yang dilakukan untuk wisata Pulau Jemur B. Kegiatan untuk pemasaran wisata Pulau Jemur	A. Berperan
		B. Penyelenggaraa n pembinaan bimbingan teknis di bidang pengembangan, pemasaran produk wisata, usaha, informasi pariwisata, pemberdayaan masyarakat	A. Kebijakan untuk berkoordinasi dalam pengembangan untuk memajukan wisata pulau jemur B. Penilaian kebijakan dalam merumuskan pengembangan wisata pulau jemur	B. Cukup berperan
		C. Pelaksanaan koordinasi, promosi potensi dengan instansi terkait, dunia usaha, stakeholder pusat dan daerah untuk pengembangan pariwisata	A. Kerjasama dari pihak yang terkait B. Alat untuk mempromosikan wisata Pulau Jemur	C. Tidak berperan

Sumber : Moditifikasi penulis, 2017.

F. Teknik Pengukuran

Untuk melihat Peranan Dinas Pariwisata, Kepemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hilir dalam pengembangan objek wisata pulau jemur maka dilakukan penilaian dengan menetapkan beberapa kategori:

Berperan : Jika hasil penelitian terhadap indikator variable pada kategori baik dan tanggapan responden berada pada 66% s/d 100%

Cukup berperan : apabila 2 indikator variable berada pada kategori baik dan tanggapan responden berada pada skor persentase 34% s/d 65%

Tidak berperan : apabila kurang dari 1 indikator variable berada pada kategori baik atau tanggapan responden berada pada skor persentase 00% s/d 33%

1. Pelaksanaan koordinasi dibidang pengembangan dan pemasaran pariwisata.

Pengukurannya:

Berperan : Apabila pelaksanaan koordinasi dibidang pengembangan dan pemasaran pariwisata memenuhi kebijakan.

Cukup berperan : Apabila pelaksanaan koordinasi dibidang pengembangan dan pemasaran pariwisata memenuhi dua dari kriteria diatas.

Tidak berperan : Apabila pelaksanaan koordinasi dibidang pengembangan dan pemasaran pariwisata memenuhi satu atau tidak satu pun dari kriteria diatas.

2. Penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis dibidang pengembangan, pemasaran produk wisata, usaha, informasi pariwisata, pemberdayaan masyarakat

Pengukuran :

Berperan : Apabila dalam penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis dibidang pengembangan, pemasaran produk wisata, usaha, informasi pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat memenuhi kebijakan.

Cukup berperan : Apabila dalam menyiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan, bimbingan teknis dibidang pengembangan, pemasaran produk wisata, usaha, informasi pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat dapat memenuhi dua dari kriteria diatas.

Tidak berperan : Apabila dalam mempersiapkan bahan penyelenggaraan pembinaan dibidang teknis pengembangan, pemasaran produk wisata, usaha, informasi pariwisata, dan pemberdayaan masyarakat memenuhi satu atau tidak satu pun dari kriteria diatas.

3. Pelaksanaan koordinasi, promosi potensi dengan instansi terkait, dunia usaha, stakeholder pusat dan daerah untuk pengembangan pariwisata.

Pengukuran:

Berperan : Apabila dalam pelaksanaan koordinasi, promosi potensi dengan instansi terkait, dunia usaha, stakeholder pusat dan daerah untuk pengembangan pariwisata memenuhi seluruh kriteria diatas.

Cukup berperan : Apabila dalam pelaksanaan koordinasi, promosi potensi dengan instansi terkait, dunia usaha, stakeholder pusat dan daerah untuk pengembangan pariwisata memenuhi dua kriteria diatas.

Tidak berperan : Apabila dalam pelaksanaan koordinasi, promosi potensi dengan instansi terkait, dunia usaha, stakeholder pusat dan daerah untuk pengembangan pariwisata memenuhi satu atau tidak satu pun dari kriteria diatas.